

BAB IV

KESIMPULAN

Bisa disimpulkan bahwa muatan sejarah perempuan dalam mata pelajaran sejarah tingkat SMA berdasarkan kurikulum 1994, KBK 2004 dan KTSP 2006 tidak terlalu banyak mengalami peningkatan dan juga tidak terlalu banyak mengalami perbedaan. Kesimpulan ini diambil peneliti berdasarkan hasil dari pengklasifikasian Tujuan Pembelajaran Umum dan Tujuan Pembelajaran Khusus (untuk kurikulum 1994) dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (untuk kurikulum 2004 dan 2006) melalui table yang dibagi berdasarkan kelas. Analisis ini juga dilakukan berdasarkan silabus, RPP, buku sejarah pegangan siswa dan metode pembelajaran pada kurikulum yang berlaku.

Dalam segi materi pembelajaran, dari kurikulum tahun 1994, 2004 hingga 2006 memang ada mengalami peningkatan, tapi itupun tidak terlalu signifikan. Pada kurikulum 1994, sejarah perempuan mulai diberikan di kelas 1 SMU yaitu pada materi Kerajaan-Kerajaan Hindu-Buddha dan Islam dimana pada masa itu terdapat tokoh perempuan yang berhasil menjadi pemimpin seperti Ratu Simo yang memimpin Kerajaan Kalingga/Holing, Ratu Tribhuana Tungadewi yang memerintah Kerajaan Majapahit dan Ratu Kalinyamat yang memerintah Jepara di Demak. Sedangkan pembahasan sejarah perempuan pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dan Islam pada kurikulum 2004 dan 2006 baru diberikan pada kelas XI.

Muatan sejarah perempuan lebih banyak diberikan di kelas 2/XI SMA. Pada kurikulum 1994, sejarah perempuan diberikan pada materi organisasi-organisasi pergerakan nasional dimana didalamnya terdapat sub pokok materi mengenai Gerakan Wanita. Begitu juga dengan kurikulum 2004 dan 2006, selain pemberian materi sejarah perempuan pada masa Kerajaan Hindu-Buddha, siswa juga diperkenalkan dengan tokoh-tokoh perempuan dan organisasinya yang terangkum dalam materi Peran dan Kedudukan Perempuan pada Masa Kolonial. Pembahasan materi mengenai gerakan Wanita serta peran dan kedudukan perempuan pada masa kolonial memperkenalkan siswa untuk lebih memaknai tokoh-tokoh perempuan serta organisasi-organisasi perempuan di Indonesia yang sudah mulai berjuang untuk mendapatkan hak-hak kesetaraan juga perjuangan untuk membentuk Negara kesatuan Indonesia.

Pada kelas 3/XII SMA, untuk kurikulum 1994 sulit ditemukan secara jelas mengenai adanya muatan sejarah perempuan. Sedangkan pada kurikulum 2004 dan 2006 terdapat tambahan materi sejarah perempuan mengenai masa pemerintahan Presiden perempuan pertama di Indonesia, Megawati Soekarno Putri yang menjabat tahun 2001 sampai 2004. Presiden Megawati juga dianggap sebagai presiden peletak dasar kehidupan demokratis karena keberhasilannya dalam melaksanakan pemilu presiden dan anggota legislative secara langsung.

Hal yang mempengaruhi muatan sejarah perempuan juga berdasarkan metode pembelajaran yang ditetapkan oleh kurikulum. Pada kurikulum 1994, pemberian materi sejarah yang sangat padat dari kelas 1 sampai 3 SMU membuat guru cenderung hanya menggunakan metode ceramah bervariasi. Metode ceramah

akan membuat siswa kurang aktif dalam mengikuti materi pembelajaran sehingga makna-makna yang terkandung dalam sejarah termasuk sejarah perempuan kurang dapat dipahami dan dihayati oleh siswa dengan baik. Pada kurikulum 2004 dan 2006, siswa dituntut untuk lebih aktif dalam proses belajar mengajar dan peran guru hanyalah sebagai fasilitator untuk membantu siswa dengan berbagai metode belajar yang ada. Penggunaan metode belajar yang beragam juga dimungkinkan karena materi yang harus ditempuh siswa lebih longgar dibandingkan dengan materi sejarah kurikulum 1994.

Buku sejarah pegangan siswa juga memiliki nilai yang cukup penting dalam pemberian informasi. Pada kurikulum 1994, buku pegangan menjadi sumber utama dalam mendapatkan pengetahuan selain guru. Maka dari itu buku-buku yang menjadi pegangan siswa pada kurikulum 1994 cenderung lebih banyak materi yang dibahas. Untuk bahan sejarah perempuan sendiri, buku pegangan sejarah SMA kurikulum 1994 lebih lengkap seperti materi mengenai Ratu Simo dan Kalinyamat. Pada buku-buku pelajaran yang beredar dengan kurikulum 2004 dan 2006, informasi mengenai Ratu Simo dan Ratu Kalinyamat sangat sedikit. Namun keberadaan teknologi yang semakin maju khususnya dalam mencari berbagai informasi mengenai sumber-sumber sejarah yang diperlukan dapat membantu siswa dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang lebih banyak.

Muatan sejarah perempuan apabila dihitung seluruhnya dan dibandingkan dengan semua pembahasan materi yang diberikan dapat disimpulkan bahwa penulisan sejarah Indonesia masih bersifat androcentris (berpusat pada laki-laki).

hal ini dapat terjadi karena faktor kebudayaan patriarki yang sudah sangat melekat pada sebagian besar masyarakat Indonesia dan juga faktor politik.

Kebudayaan patriarki sudah sangat berakar kuat pada masyarakat Indonesia sejak jaman manusia purba. Bahkan kebudayaan patriarki kini dianggap lumrah oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Kebudayaan patriarki menghasilkan ketidaksetaraan gender dan pengecilan peran perempuan dalam masyarakat. Di dalam sejarah Indonesia sendiri hanya sedikit sumber yang ada mengenai sejarah perempuan. Perempuan hanya dianggap sebagai peran pembantu yang kurang nilai kepahlawanannya.

Faktor yang kedua adalah politik dimana dalam penyusunan kurikulum sejarah nasional terdapat campur tangan kepentingan politik didalamnya terutama yang terjadi pada kurikulum 1994 dimana pada masa itu pemerintahan Orde Baru sedang berkuasa. Pada masa Orde Baru juga pergerakan perempuan di Indonesia mengalami penjagalan dan masa vakum pada era pemerintahan Soeharto yang dikenal dengan nama Orde Baru. Rezim Orde Baru dianggap melakukan berbagai cara yang berguna untuk melanggengkan kekuasannya yang terbukti dapat menjabat selama 32 tahun. Perempuan pun dianggap tidak layak untuk berpolitik sehingga pemerintahan Orde Baru hanya memperbolehkan organisasi-organisasi yang mereka dirikan sendiri seperti PKK dan Dharma Wanita. Kepentingan untuk melanggengkan pemerintahan juga memasuki ranah pendidikan dimana kurikulum sejarah nasional dirancang sedemikian rupa untuk menentukan faktor pemilihan peristiwa sejarah yang dijadikan topik dalam pendidikan sejarah beserta

penafsiran resmi terhadap peristiwa itu yang tentunya atas persetujuan pemerintah.

Setelah Orde Baru muncul, mulai banyak rahasia-rahasia sejarah yang terbongkar, masyarakat semakin berani untuk bertindak kritis dalam mengeluarkan pendapat. Semakin banyak juga tulisan-tulisan sejarah yang beredar dan membongkar kebohongan yang telah diciptakan Rezim Orde Baru seperti kebenaran sejarah mengenai Gerwani yang ditulis oleh Saskie E Wieringa berjudul "Penghancuran Gerakan-Gerakan Wanita".

Sejarah perempuan sudah seharusnya disampaikan kepada para siswa secara maksimal agar siswa menyadari bahwa wanita merupakan bagian dari sejarah yang tidak dapat dikecilkan kontribusinya. Guru dapat menyampaikan materi sejarah perempuan dalam setiap peristiwa sejarah tanpa perlu digolong-golongkan atau diporsikan pada satu materi tertentu saja. Dengan demikian dapat diharapkan bahwa materi sejarah yang diberikan kepada siswa dapat bersifat androgynus yaitu dimana sejarah yang baik kaum laki-laki dan perempuan bersama mengambil bagian didalamnya.